

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan masing-masing variabel.

A. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri syariah di Indonesia secara informal dimulai sebelum dikeluarkannya kebijakan hukum sebagai landasan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut yang mulai mendasari munculnya berbagai institusi keuangan syariah di Indonesia.

Kebijakan pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang yang baru. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang prinsip bagi hasil.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1992. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Kemudian di ikuti oleh

BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia yang berada di Yogyakarta.¹

Jika dilihat dari makro ekonomi, perkembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Menurut UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara dan swasta nasional atau bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang bank syariah di Indonesia. Dengan adanya kesempatan ini akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terlebih apabila terjalin hubungan kerjasama yang baik antara bank-bank syariah.²

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan di Indonesia. Berdirinya bank-bank baru yang berkerja dengan menggunakan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini, seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).³

Pada tahun 1999, dikeluarkan Undang-Undang No.23 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian di keluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjamin hukum perbankan syariah yang lebih rinci, jenis-jenis usaha bank syariah sudah jelas dan kelayakan serta penyaluran dana bank syariah sudah jelas.

¹ M. Syafe'i Antonio, *Bank Islam: teori dan praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2005, hlm. 21.

³ *Ibid*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

B. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Bank memiliki fungsi yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga bank dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan maksimal. Salah satu sumber dana terbesar bank syariah yaitu simpanan dari masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, yayasan dan koperasi baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Dana tersebut berbentuk tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana.⁴

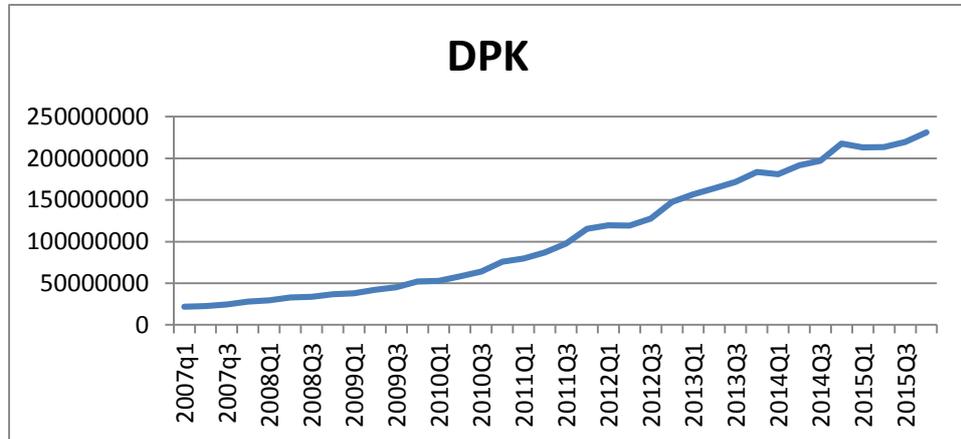
⁴ Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2006 , hlm. 98.

Berdasarkan prinsip bank syariah untuk dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk: ⁵

- a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang menjamin keamanan dana nasabah dan pengembaliannya tanpa mendapatkan imbalan.
- b. Sepakat untuk berpartisipasi dalam modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk melakukan investasi umum (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*) dimana bank sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

⁵*Ibid.*, hlm. 53

Berikut ini adalah perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah di Indonesia tahun 2007- 2015.



Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah)

Grafik 4.1

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
di Indonesia. Periode 2007-2015.**

Sesuai dengan grafik 4.1 pada tahun 2007 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah sebesar Rp. 28,011 milyar dan pada tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 36.852 milyar, di tahun 2009 jumlahnya menjadi 52,271 dan menjadi 76,036 ditahun 2010, peningkatan paling tinggi terjadi di tahun 2011 yaitu sebesar 115,415 dan di tahun 2012 Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah sebesar 147,512, tiga tahun kemudian jumlahnya terus bertambah menjadi Rp. 231.175 milyar di tahun 2015. Dana Pihak Ketiga tertinggi yaitu pada akhir tahun 2015 sebesar Rp. 231.175.000 milyar dan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu Rp. 21.882.933 milyar.

C. Perkembangan Inflasi

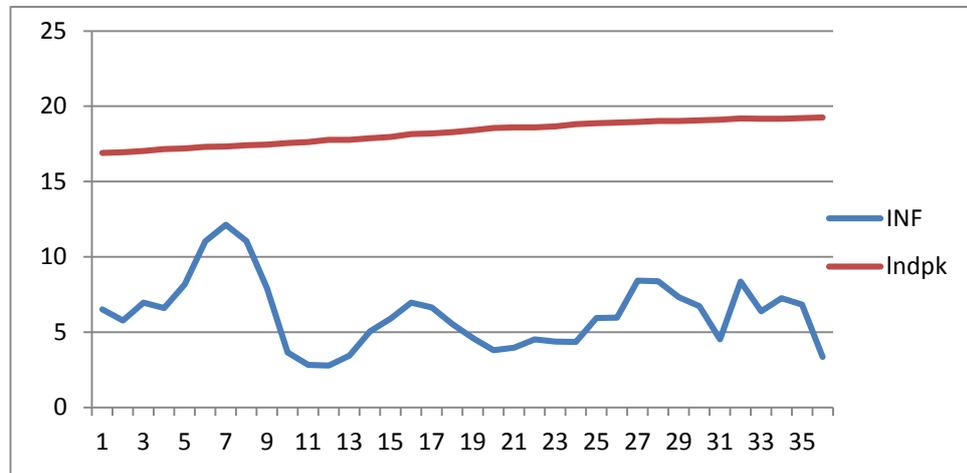
Inflasi adalah proses naiknya harga barang-barang umum secara terus menerus selama satu periode. Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Apabila inflasi disuatu negara terjadi kenaikan terus-menerus akan memperburuk kinerja perekonomian disuatu negara.

Apabila terjadi inflasi, maka jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan dana nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi dapat mengakibatkan daya beli mata uang menurun sehingga dibutuhkan dua kali jumlah uang yang sama untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam kondisi ini, masyarakat di Indonesia akan menarik dana simpanan perbankan syariah lebih besar dari biasanya.

Pada teori Efek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi satu persen akan mengakibatkan kenaikan satu persen pada tingkat suku bunga. Dalam ekonomi syariah tidak diperkenankan menggunakan bunga maka pada perbankan syariah akan menaikkan nisbah bagi hasil yang digunakan sebagai jalan untuk mengatasi agar masyarakat tidak berpaling dari bank syariah dan memilih bank konvensional karena menawarkan bunga yang tinggi.⁶ Dengan menaikkan nisbah bagi hasil dapat membuat nasabah bank syariah akan tetap menyimpan dananya pada bank syariah.

⁶ Fisher, I. 1930, *The Theory of Interest*, Macmillan, New York

Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan inflasi periode Maret 2007 hingga Desember 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 4.2

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah dan Inflasi di Indonesia. Periode 2007-2015 (persen).

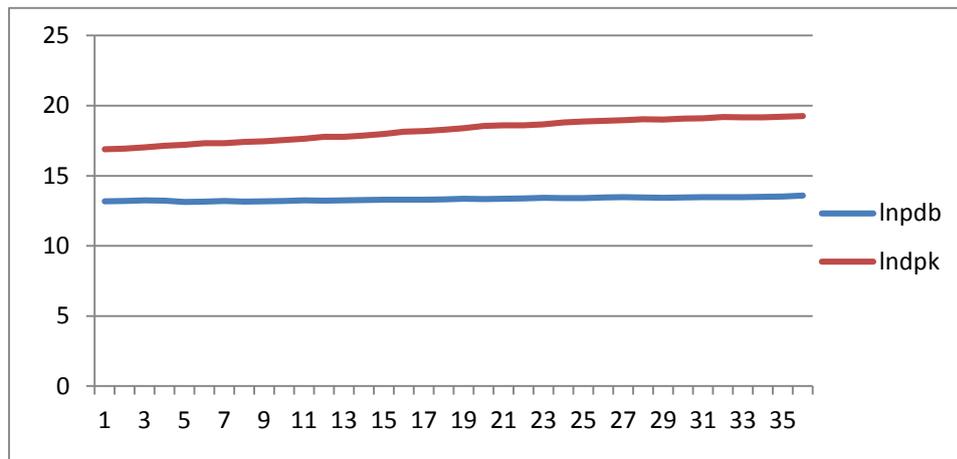
Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa perkembangan inflasi di Indonesia terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2007 sebesar 6,95 persen, ditahun 2008 menjadi 11,03 persen, pada tahun 2009 inflasi di Indonesia menurun menjadi 2,83, pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,89 persen, di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,61 persen, pada tahun 2012 menjadi 4,37, tahun 2013 tingkat inflasi menjadi 8,42 persen, ditahun 2014 menurun menjadi 4,53 persen, dan pada tahun 2015 inflasi di Indonesia sebesar 6,83 persen. Perkembangan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2008 dan terendah di tahun 2009 hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi penurunan harga minyak mentah Internasional yang mendorong

pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 inflasi meningkat dari 4,35 persen menjadi 8,38 persen, meningkatnya tekanan inflasi tersebut karena terjadi peningkatan harga pangan secara global seperti beras, jagung dan kedelai.

D. Perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi sebuah negara pada suatu periode. Untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu adalah menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu negara.

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah suatu barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan PDB periode Maret 2007 hingga Desember 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah)

Gambar 4.3

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah

dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Periode 2007-2015 (milyar)

Berdasarkan grafik 4.3 dapat diketahui bahwa perkembangan Produk Domestik Bruto di Indonesia. Pada tahun 2007 sebesar 5616371 milyar, ditahun 2008 menjadi 5386411 milyar, pada tahun 2009 inflasi di Indonesia menurun menjadi 5616371 milyar, pada tahun 2010 meningkat menjadi 5942506 milyar, di tahun 2011 menjadi 6328239 milyar, pada tahun 2012 menjadi 6721087 milyar, tahun 2013 menjadi 7096798 milyar, di tahun 2014 menjadi 7031046 milyar, dan pada tahun 2015 jumlah Produk Domestik Bruto di Indonesia sebesar 7523147 milyar. Perkembangan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2015 dan terendah di tahun 2008. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan aktivitas perekonomian suatu negara. Karena berimbang pada pendapatan masyarakat, apabila PDB

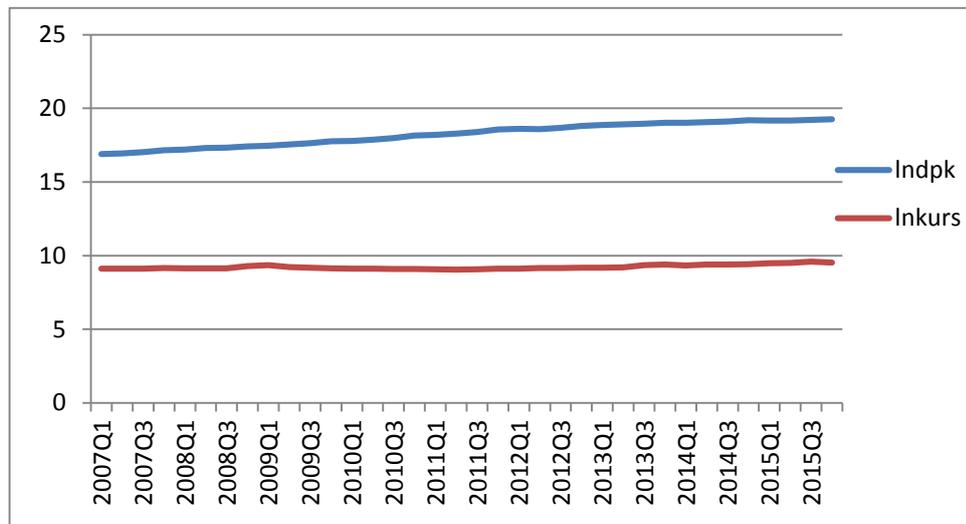
menunjukkan peningkatan maka menandakan bahwa perekonomian negara tersebut berkembang dengan baik.

E. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah / Kurs

Kurs atau nilai tukar rupiah merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar valuta asing adalah harga satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. nilai tukar menjelaskan dua mata uang, yang keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap kedua mata uang tersebut⁷

Data nilai tukar rupiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga jual dan harga beli dollar Amerika Serikat yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh, perkembangan nilai tukar periode Maret 2007 hingga Desember 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

⁷ Sukirno, Sadono. 2000, “ *Pengantar Teori Makro Ekonomi*”, Edisi kedua, Jakarta, hal. 358



Sumber: Bank Indonesia (Diolah)

Gambar 4.4

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
dan Nilai Tukar/Kurs terhadap Dollar Amerika di Indonesia.
Periode 2007-2015 (rupiah)**

Berdasarkan grafik 4.4 dapat diketahui bahwa perkembangan nilai tukar rupiah/ kurs di Indonesia. Pada tahun 2007 yaitu Rp. 9142, pada tahun 2008 menjadi Rp. 9378, pada tahun 2009 menjadi 9681, pada tahun 2010 menurun menjadi Rp. 8924, di tahun 2011 menjadi Rp. 8823, pada tahun 2012, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang diakibatkan karena ketidakpastian ekonomi global dan meningkat menjadi Rp. 9590, ditahun 2013 meningkat menjadi Rp. 11613, di tahun 2014 menjadi Rp. 12212, dan pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat di Indonesia sebesar Rp. 14657. Perkembangan nilai tukar rupiah tertinggi terjadi di tahun 2015 dan terendah di tahun 2011.

F. Perkembangan BI Rate

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁸

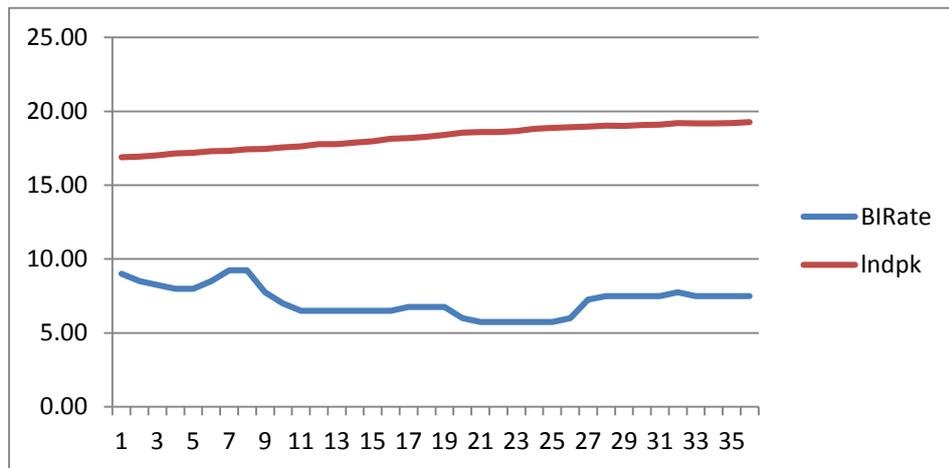
Adanya kenaikan BI Rate sebagai tingkat suku bunga pendamping pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak akan berdampak pada kinerja bank syariah. Karena naiknya BI Rate akan mempengaruhi tingkat suku bunga maka suku bunga pinjaman dan suku simpanan bank konvensional akan naik, sehingga masyarakat cenderung akan menyimpan dananya pada bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika tingkat bunga tinggi maka masyarakat akan menabung dan mengurangi jumlah konsumsi. Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi saat ini dan menyimpannya untuk konsumsi yang akan datang. Sedangkan dalam sistem ekonomi syariah tidak menggunakan tingkat bunga melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam.⁹

BI Rate yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk presentase. Dan berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat perkembangan *BI Rate* pada tahun 2007 hingga 2015 dibawah ini sebagai berikut.

⁸ www.bi.go.id diakses 21 Desember 2016

⁹ Ghafur W, Muhammad, 2007, *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*, Yogyakarta: Biruni Press, hal. 67-70.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

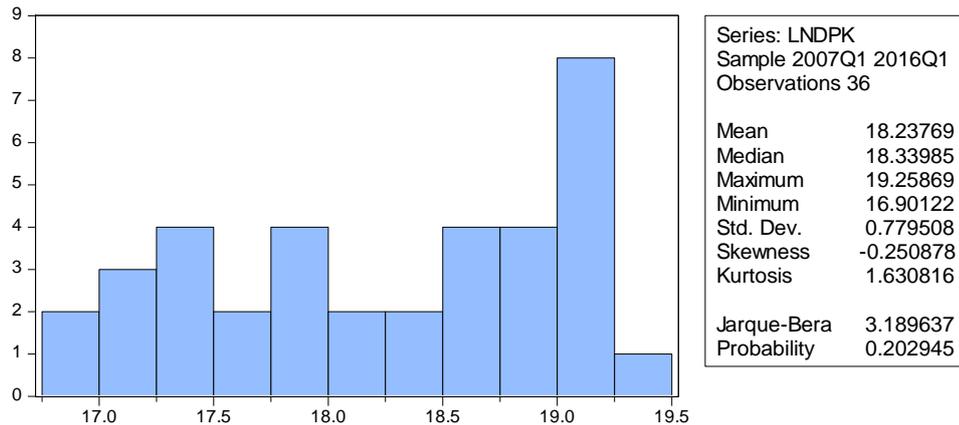
Gambar 4.5

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
dan BI Rate di Indonesia. Periode 2007-2015 (persen)**

Berdasarkan grafik 4.5 dapat diketahui bahwa perkembangan BI Rate pada tahun 2007 sebesar 8,25 persen, ditahun 2008 menjadi 9,25 persen, pada tahun 2009 BI Rate di Indonesia menurun menjadi 6,50, pada tahun 2010 tetap di angka 6,50 persen, di tahun 2011 meningkat menjadi 6,75 persen, pada tahun 2012 menurun menjadi 5,75 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 7,25 persen, ditahun 2014 menurun menjadi 7,50 persen, dan pada tahun 2015 tetap sebesar 7,50 persen.

B. Analisis Deskriptif Variabel

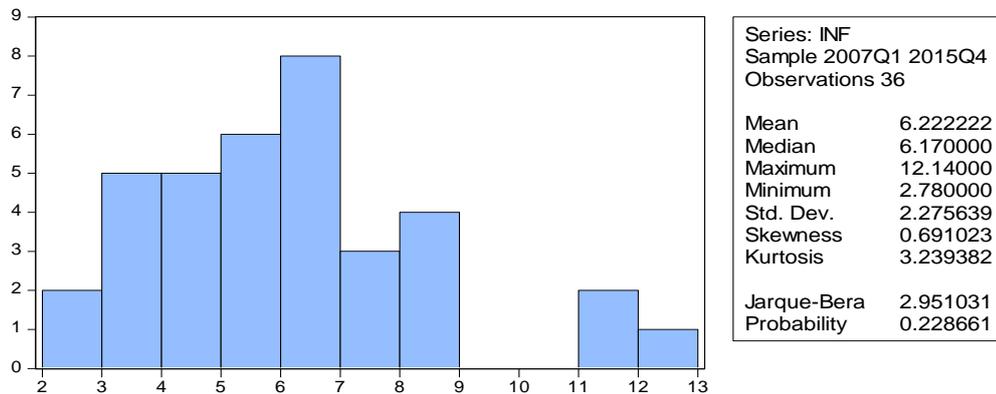
Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah sample, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standar deviation*), masing-masing variable yang disajikan pada tabelberikut:



Gambar 4.6

Analisis Deskriptif Dana Pihak Ketiga (DPK)

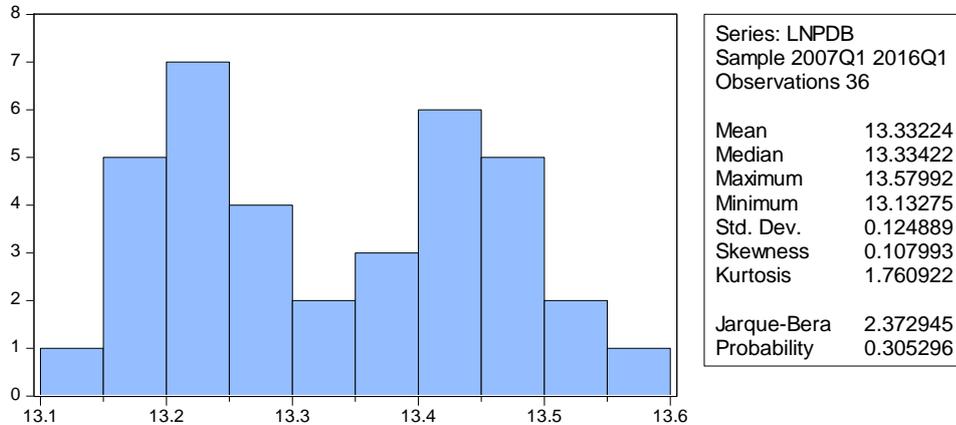
Dalam gambar 4.6 menjelaskan tentang variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh nilai terendah 16.90122 dan tertinggi 19.25869 dengan rata-rata 18.23769 dan standar deviasi 0.779508.



Gambar 4.7

Analisis Deskriptif Inflasi

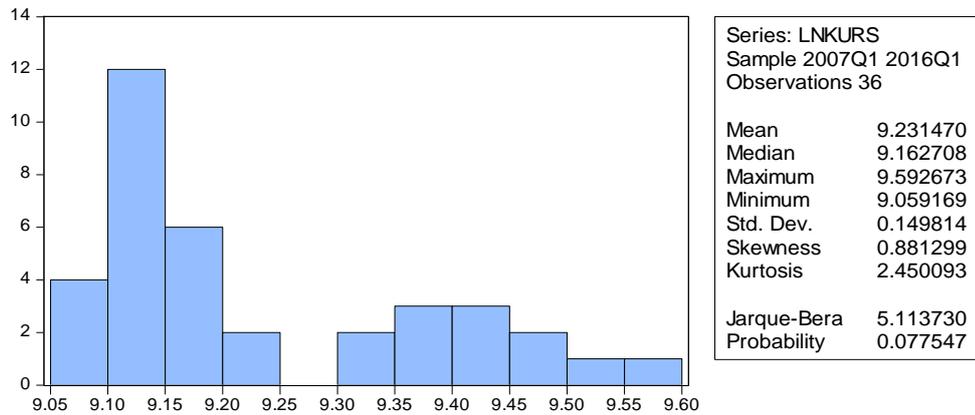
Dalam gambar 4.7 variabel inflasi memiliki nilai terendah 2.780000 dan tertinggi 12.14000 dengan nilai rata-rata 6.222222 dan standar deviasi 2.275639.



Gambar 4.8

Analisis Deskriptif Produk Domestik Bruto (PDB)

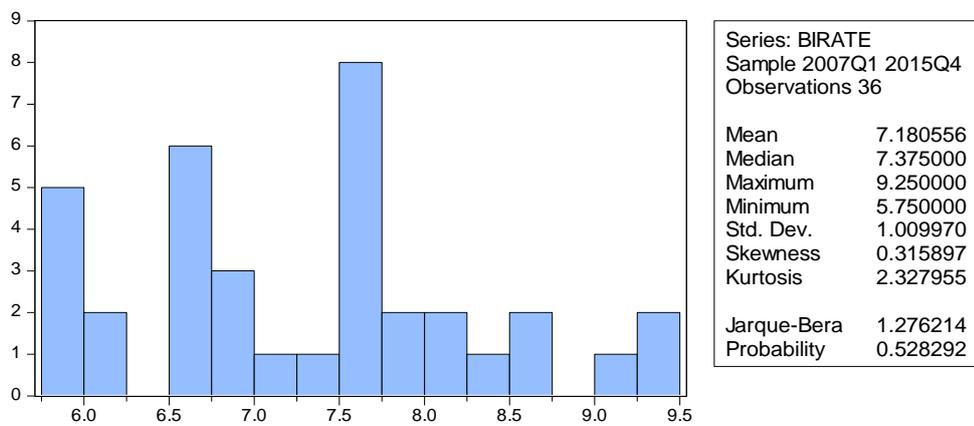
Dalam gambar 4.8 Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki nilai terendah sebesar 13.13275 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 13.57992 dengan nilai rata-rata 13.33224 dan standar deviasi 0.124889.



Gambar 4.9

Analisis Deskriptif Nilai Tukar (kurs)

Dalam gambar 4.9 variable nilai tukar (kurs) memiliki nilai terendah 9.059169 dan nilai maksimal 9.592673 dengan nilai rata-rata 9.231470 dan standar deviasi 0.149814.



Gambar 4.10

Analisis Deskriptif BI Rate

Dalam gambar 4.10 variable bi ratememiliki nilai terendah 5.750000 dan nilai maksimal 9.250000 dengan nilai rata-rata 7.180556 dan standar deviasi 1.009970.

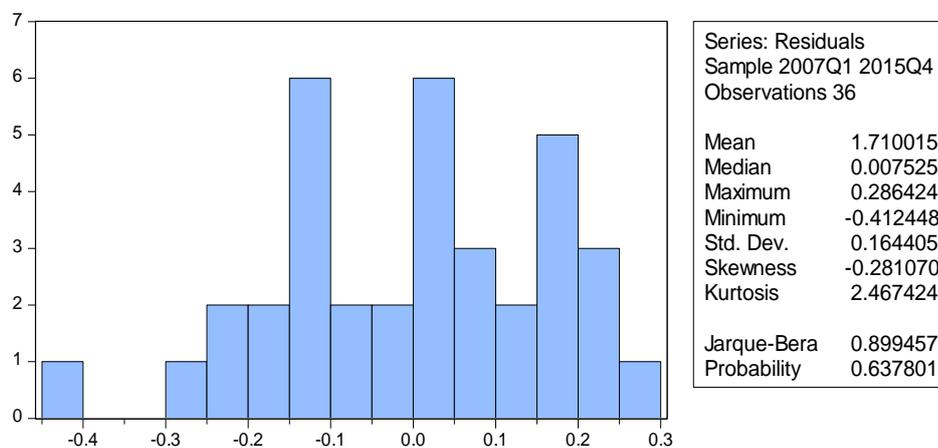
A. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan melihat nilai *probability*. Jika nilai *probability* lebih besar dari nilai derajat kesalahan yaitu 5 persen (0,05), maka penelitian ini tidak ada permasalahan normalitas atau dengan kata lain data terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai *probability* lebih kecil dari 5persen atau 0,05, maka penelitian ini data tidak terdistribusi normal. Setelah data dalam penelitian ini diolah menggunakan Eviews 8 maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Gambar 4.11

Uji Normalitas



Nilai probabilitas adalah 0.637801 sehingga dapat dikatakan model ini adalah tidak signifikan, sementara berdasarkan uji normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas dari Jarque-Bera (JB), jika probabilitas $> 0,05$, maka model dinyatakan normal. Berdasarkan parameter ini diketahui bahwa besaran nilai probabilitas pada Jarque-Bera adalah 0,899457, lebih besar

dibandingkan nilai 0,05, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan bisa dilanjutkan kepengujian berikutnya.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas berfungsi untuk mengetahui hubungan antar kolerasi yang signifikan diantara dua atau beberapa variabel independen dalam regresi linier dengan menggunakan uji kolerasi parsial antar beberapa variable untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi multikolonieritas antar variabel terikat dan variabel bebas.¹⁰

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikoleniaritas

	BIRATE	INF	KURS	PDB
BIRATE	1.000000	0.705769	0.237591	-0.316557
INF	0.705769	1.000000	0.158321	-0.186422
KURS	0.237591	0.158321	1.000000	0.707247
PDB	-0.316557	-0.186422	0.707247	1.000000

Sumber: Data diolah

Suatu data dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai correlation antar variable independent < 0,8. Berdasarkan tabel diatas, data tersebut tidak terindikasi multikolinearitas antara variable inflasi, PDB, kurs dan BI Rate dengan nilai kolerasi < 0,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independent dalam model

¹⁰ Gujarati, Damodar N. 2006 “*Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 2*”, Erlangga : Jakarta, hal, 67.

regresi ini. Selain menggunakan correlation, cara yang dapat dilakukan adalah melihat nilai Variance Inflation Factors, apabila VIF dibawah 10 atau 5 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikoleniaritas. Berikut adalah hasil penelitian menggunakan VIF.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	15.58374	18383.87	NA
INF	0.000341	17.57506	2.022477
LOG(PDB)	0.206939	43396.13	3.701885
LOG(KURS)	0.133324	13406.86	3.431957
BIRATE	0.002918	180.8858	3.413478

Berdasarkan tabel diatas, data tersebut tidak terindikasi multikolinearitas antara variable inflasi, PDB, kurs dan *BI Rate*. Dilihat dari nilai VIF, karena nilai VIF dibawah 5 atau 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.¹¹

¹¹ Ibid, hal. 82

Tabel 4.13

Hasil Uji white Heteroskedastisity-Test

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.936657	Prob. F(13,22)	0.5347
Obs*R-squared	12.82621	Prob. Chi-Square(13)	0.4613
Scaled explained SS	6.978180	Prob. Chi-Square(13)	0.9033

Apabila dilihat dari tabel di atas, nilai Obs*R-squared adalah 0.4613 lebih besar dari 5 persen (0,05). Maka dapat dikatakan model diatas tidak mengandung heteroskedastisitas. Sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu uji Autokolerasi.

d. Analisis Uji Autokolerasi

Autokolerasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kolerasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokolerasi dalam suatu model, digunakan uji Lagrange Multiplier (LM Test) dengan membandingkan nilai probabilitas R-Square dibawah 5 persen (0,05), atau dengan melihat nilai Durbin Watson apabila d terletak antara -2 sampai dengan +2 maka data terbebas dari masalah autokolerasi.

Tabel 4.14**Hasil Uji Lagrange Multiplier Test**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.252845	3.514993	-0.071933	0.9431
INF	-0.006885	0.016626	-0.414146	0.6818
LOG(PDB)	0.034941	0.396719	0.088076	0.9304
LOG(KURS)	-0.029986	0.316512	-0.094739	0.9252
BIRATE	0.014881	0.047139	0.315670	0.7545
RESID(-1)	0.633368	0.184400	3.434746	0.0018
RESID(-2)	-0.225186	0.204456	-1.101393	0.2798
R-squared	0.299923	Mean dependent var	1.710015	
Adjusted R-squared	0.155079	S.D. dependent var	0.164405	
S.E. of regression	0.151121	Akaike info criterion	-0.768812	
Sum squared resid	0.662285	Schwarz criterion	-0.460906	
Log likelihood	20.83862	Hannan-Quinn criter.	-0.661345	
F-statistic	2.070666	Durbin-Watson stat	2.056517	
Prob(F-statistic)	0.087852			

Hasil analisis output berdasarkan tabel diatas,tampak bahwa nilai Obs probabilitas F statistik $0,087852 > 0,05$ maka dapat disimpulkan model diatas bebas dari masalah autokolerasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokolerasi juga bisa menggunakan Durbin Watson yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (d). Jika d

terletak antara -2 sampai dengan +2 maka tidak terjadi autokolerasi. Karena nilai durbin watson dalam penelitian ini adalah 2.056517, maka penelitian ini bebas dari masalah autokolerasi.

B. Uji Hipotesis

Tabel 4.15

Uji statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-50.32159	3.947624	-12.74731	0.0000
INF	0.066208	0.018453	3.587891	0.0011
LOG(PDB)	4.583985	0.454905	10.07679	0.0000
LOG(KURS)	0.989485	0.365136	2.709911	0.0109
BIRATE	-0.292717	0.054016	-5.419059	0.0000
R-squared	0.955517	Mean dependent var	18.23769	
Adjusted R-squared	0.949778	S.D. dependent var	0.779508	
S.E. of regression	0.174690	Akaike info criterion	-0.523359	
Sum squared resid	0.946017	Schwarz criterion	-0.303426	
Log likelihood	14.42046	Hannan-Quinn criter.	-0.446596	
F-statistic	166.4756	Durbin-Watson stat	0.960468	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan persamaan regresi (log-linier) berganda di atas dapat dijelaskan:

$$\text{LOGDPK} = -50.32159 + 0.066208 (\text{INF}) + 4.583985 (\text{LOGPDB}) + 0.989485 (\text{LOGKURS}) - 0.292717(\text{BIRATE}) + e$$

Persamaan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta diperoleh sebesar -50.32159 , yang berarti jika variabel independen sama dengan nol (0), maka DPK tetap akan bersifat negatif.
2. Koefisien regresi inflasi bernilai positif artinya pada saat variabel tingkat inflasi (X_1) mengalami kenaikan satu persen maka presentase variabel dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2015 (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.066208 persen.
3. Koefisien regresi $\log(\text{PDB})$ bernilai positif artinya pada saat nilai produk domestik bruto (X_2) mengalami kenaikan satu persen maka presentase variabel dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2015 (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 4.583985 persen.
4. Koefisien regresi $\log(\text{kurs})$ bernilai positif artinya pada saat nilai tukar rupiah (X_3) mengalami kenaikan satu persen maka presentase variabel dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.989485 persen.
5. Koefisien regresi BI Rate bernilai negatif artinya pada saat BI Rate (X_4) mengalami kenaikan satu persen maka presentase variabel dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.292717 .

C. Uji Statistik T (Parsial)

a. INF

Hasil regresi menunjukkan bahwa INF memiliki efek yang positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan koefisien sebesar 0.0011. Nilai dari probabilitas Inflasi sebesar 0,0011 menunjukkan bahwa koefisien ini signifikan secara statistik dilihat dari standar error dan t-hitungnya. Karena, nilai probabilitas $<0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Inflasi (INF) mempengaruhi DPK. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya ekspektasi bahwa Inflasi (INF) memberikan efek positif pada DPK. Nilai koefisien sebesar 0.066208 artinya ketika Inflasi (INF) mengalami perubahan satuan, maka DPKnya akan bertambah sebesar 0.066208. Sehingga Hipotesis H_1 diterima.

b. PDB

Hasil regresi menunjukkan bahwa PDB memiliki efek yang positif terhadap DPK, dengan koefisien sebesar 4.583985. Nilai dari probabilitas PDB sebesar 0.0000. Karena, nilai probabilitas $<0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PDB mempengaruhi DPK secara signifikan. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan efek positif terhadap DPK. Nilai koefisien sebesar 4.583985 artinya ketika PDB mengalami perubahan satu satuan, maka PDB akan bertambah sebesar 4.583985 satuan. Sehingga Hipotesis H_2 diterima.

c. Nilai Tukar / Kurs.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Kurs memiliki efek yang positif terhadap DPK, dengan koefisien sebesar 0.989485. Nilai dari probabilitas nilai kurs sebesar 0.0109. Karena, nilai probabilitas $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kurs mempengaruhi DPK. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya ekspektasi bahwa nilai kurs akan memberikan efek positif pada DPK. Nilai koefisien sebesar 0.0109 artinya ketika Nilai Kurs mengalami perubahan satuan, maka DPK akan bertambah sebesar 0.0109. Sehingga hipotesis H_3 diterima.

d. BI Rate

Hasil regresi menunjukkan bahwa *BI Rate* memiliki efek yang positif terhadap DPK, dengan koefisien sebesar -0.292717. Nilai dari probabilitas nilai kurs sebesar 0.0000. Karena, nilai probabilitas $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kurs mempengaruhi DPK. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan adanya ekspektasi bahwa nilai kurs akan memberikan efek negatif pada DPK. Nilai koefisien sebesar -0,292717 artinya ketika Nilai Kurs mengalami perubahan satuan, maka DPK akan berkurang sebesar 0,292717 persen. Sehingga hipotesis H_4 ditolak.

D. Uji statistik F (secara bersama-sama)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (inflasi, pdb, kurs dan BI Rate) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil nilai F-statistik adalah 166.4756 dengan nilai

probabilitas sebesar 0.000000. Karena nilai probabilitas $<0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Inflasi, PDB, Nilai tukar/ kurs dan BI Rate secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

E. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R_2)

Koefisien determinasi R_2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai R-squared. Nilai R-squared menjelaskan seberapa besar variabel independent menjelaskan variabel dependent. Dapat kita ketahui bahwa nilai R-squared adalah 0.949778 atau sama dengan 94,9778 persen. Maka, variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 94,9778 persen dan sisanya 5,0222 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R-squared diatas 5 persen atau cenderung mendekati 1 maka, dapat disimpulkan bahwa variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

F. Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan hasil dari pengujian statistik dan ekonomi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menerangkan variabel – variabel yang dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank syariah. Dari keempat variabel independen (Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs dan BI Rate) yang dimasukkan kedalam pengujian statistik ternyata semua variabel berpengaruh secara signifikan.

1. Berdasarkan hasil nilai F-statistik adalah 166.4756 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Karena nilai probabilitas $<0,05$ maka signifikan. Berarti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs dan BI Rate bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi berpengaruh positif dan signifikan dilihat dari t-hitungnya dengan nilai probabilitas sebesar 0.0011. Karena tingkat probabilitas <0.05 maka secara parsial, inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika inflasi mengalami kenaikan 1 persen maka presentase variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 0.066208 persen.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Suharyanti (2013). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif. Apabila Inflasi di Indonesia masih tergolong rendah atau ringan maka akan berdampak positif terhadap perekonomian. Seperti meningkatkan semangat untuk menabung, meningkatnya investasi dalam perekonomian. Tetapi, apabila inflasi yang terjadi di Indonesia tinggi atau *hyperinflation* maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketika inflasi tinggi, maka harga-harga barang baik primer ataupun sekunder akan ikut naik, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau membelanjakan uangnya dan memilih untuk menabungkan uangnya.

Pada teori Efek Fisher juga menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dan karena pada operasional bank syariah tidak menggunakan sistem bunga maka bank syariah akan menggantinya dengan meningkatkan nisbah bagi hasil, hal tersebut dilakukan agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga tinggi.¹² Sehingga dengan dinaikkannya nisbah bagi hasil maka nasabah akan tetap menyimpan dananya pada bank syariah.

¹² Fisher, I. 1930, *The Theory of Interest*, Macmillan, New York

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wibowo dan Suharyanti (2008), Tingkat inflasi memiliki pengaruh positif terhadap 10 Bank Devisa yang ditelitinya. Artinya apabila tingkat inflasi naik satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) di 10 Bank Devisa akan naik sebesar Rp. 7.33.481,864 juta, begitupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan inflasi maka banyak masyarakat yang tidak mau membelanjakan uangnya karena inflasi naik berarti harga barang ikut naik sehingga masyarakat lebih memilih untuk tetap menyimpan uangnya di bank daripada membelanjakan barang yang sama dengan harga yang lebih mahal.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan dilihat dari t-hitungnya dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. karena probabilitas <0.05 maka secara parsial Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga. Jika Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan 1 persen maka presentase variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 4.583985 persen.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Panorama (2016). Dalam teori kausalitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang baik akan menaikkan *mudharabah*. Karena masyarakat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan, sehingga pendapatan masyarakat

juga ikut meningkat. Sehingga sesuai dengan teori, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah di Indonesia juga akan meningkat.

Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Aziz dan Suharyanti (2013) bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini dikarenakan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap tabungan yang disebabkan karena kuatnya kinerja investasi pada sektor riil sehingga mengakibatkan peningkatan PDB.

Dengan adanya dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dari beberapa sektor ekonomi akan menaikkan pertumbuhan PDB. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami peningkatan maka hal tersebut akan mempengaruhi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pengeluaran konsumsi dan tabungan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Keynes bahwa tingkat pendapatan akan mempengaruhi tingkat tabungan dengan fungsi tabungan $S=Y-C$ atau $S=I$, S =Tabungan, Y =Pendapatan, C =Konsumsi penawaran. Artinya ketika pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat maka tabungan mudharabah juga mengalami peningkatan, karena tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi tapi sebagian juga untuk disimpan (*saving*).

4. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Nilai Tukar/Kurs berpengaruh positif dan signifikan. Nilai tukar/kurs terhadap Dana

Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dengan nilai probabilitas sebesar 0.0109. karena tingkat signifikan $<0,05$ maka secara parsial nilai tukar/kurs berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika Nilai tukar/kurs mengalami kenaikan 1 persen maka presentase variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 0.989485 persen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Suhendra (2008) Menyatakan bahwa Kurs berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 10 Bank Devisa di Indonesia. Dan dapat dikatakan jika nilai kurs naik sebanyak satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) di 10 Bank Devisa akan naik sebesar 47.382,476 juta. Dengan demikian apabila nilai per satu Dollar meningkat maka akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank syariah saat harga Dollar naik daripada untuk membelanjakannya, karena semua harga akan mengalami kenaikan.

Apabila kurs rupiah terhadap Dollar menurun, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami penurunan. Sedangkan, apabila kurs rupiah terhadap Dollar naik, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami peningkatan. Karena ketika rupiah sedang menguat maka masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Artinya,

meskipun kurs relatif fluktuatif, masyarakat akan tetap menabung di bank syariah sehingga Dana Pihak Ketiga akan meningkat, diantaranya melalui deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *wadiah*. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat cukup besar dengan bank syariah sehingga masyarakat akan tetap menyimpan uangnya pada Bank Syariah meskipun kurs rupiah terhadap Dollar sedang meningkat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ilmiah (2013) menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah* bank syariah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan adanya pengaruh positif signifikan berarti nilai kurs dan simpanan *mudharabah* menunjukkan hubungan searah artinya besarnya nilai kurs semakin tinggi akan mengakibatkan simpanan tabungan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan *mudharabah*.

5. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif dan signifikan. Dilihat dari t-hitungnya dengan probabilitas 0.0000. Karena tingkat signifikan $<0,05$ maka secara parsial *BI Rate* berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika *BI Rate* mengalami kenaikan 1 persen maka presentase variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan sebesar 0.292717 persen.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Julianti (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan *BI Rate* Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah. Dalam penelitiannya menyatakan adanya kenaikan *BI Rate* sebagai tingkat suku bunga pendamping bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap kinerja bank syariah.

Sebab naiknya *BI Rate* akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang di ikuti juga oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional, sehingga masyarakat akan memilih menyimpan dananya di bank konvensional di banding bank syariah.

Apabila *BI Rate* meningkat maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menurun, hal ini berarti perubahan yang terjadi pada suku bunga *BI Rate* tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK). Faktor yang menyebabkan *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) kemungkinan dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang sedang baik sehingga akan lebih menguntungkan jika dananya digunakan untuk bisnis daripada dipergunakan untuk menabung.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ipando (2008) dan Anniswah (2011). Dalam kesimpulannya menyatakan apabila suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari bagi hasil bank syariah maka nasabah akan memilih menyimpan dananya di bank konvensional. Oleh karena itu naik turunnya *BI Rate* secara umum tidak akan berimbas pada naik turunnya Dana Pihak

Ketiga (DPK) bank syariah sehingga, nasabah tidak akan merespon secara berlebihan ketika *BI Rate* dinaikkan atau diturunkan oleh pemerintah sehingga tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia pada tahun 2007-2015.